

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dan agraris yang terdiri dari banyak pulau dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor terpenting sebagai penopang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak khususnya kebutuhan hidup makanan pokok manusia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara. Hasil pertanian diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan harapan mampu memenuhi permintaan jumlah kebutuhan pokok dalam negeri atau lebih untuk diekspor ke negara lain yang mengalami kekurangan kebutuhan pokok. Meskipun struktur ekonomi telah bertransformasi, sektor pertanian masih menjadi primadona perekonomian di Indonesia yang cenderung ditopang oleh sektor industri dan jasa. Selain perannya sebagai penyedia pangan nasional, sebagian besar tenaga kerja berkecimpung di sektor pertanian dikarenakan jumlah pekerja baru yang terus meningkat setiap tahunnya. Di samping itu, para pekerja tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan hidup mereka. Kebutuhan akan pangan nasional masih mengandalkan sektor pertanian (Supriyanto Teguh, 2014 : 1)

Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan yang lalu. Perhatian ini timbul karena adanya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan semakin tingginya tingkat kesenjangan yang terjadi. Hal ini telah dikemukakan oleh beberapa Ahli, Andayani (2010 : 1) menyebutkan bahwa sektor pertanian memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia yaitu sebagai pemasok bahan pangan dan bahan baku industri, sumber pendapatan nasional, menyediakan kesempatan kerja, sumber investasi, dan sebagai penghasil devisa negara. Dengan demikian, informasi mengenai kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan informasi yang penting bagi masyarakat dalam menyadari

permasalahan yang terjadi sehingga diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan diambil langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan ketimpangan berkaitan dengan kemiskinan. Menurut Kuncoro (2010 : 47) di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan. Adanya permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut mengindikasikan ada proses yang salah dalam pembangunan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat bagaimana peningkatan perekonomian suatu wilayah. Apabila perekonomian itu bekerja dengan baik, maka hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat di nikmati secara adil dan merata bagi seluruh bagi seluruh pelaku ekonomi termasuk masyarakat. pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) tidak mampu memecahkan permasalahan mendasar di negara berkembang, meskipun target pertumbuhan ekonomi telah pertahunnya telah tercapai. Lincoln Arsyad dalam bukunya mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan, system kelembagaan yang dimaksud adalah perbaikan segala bidang seperti ekonomi, hukum, sosial dan budaya (Arsyad, 2010 : 1).

Untuk mengatasi hal itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan desa. Dulu ada program-program bantuan desa, seperti Impres Desa Tertinggal (IDT) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), sedangkan saat ini ada bantuan langsung tunai (BLT) dan beras untuk rakyat miskin (raskin). Namun sering kali kita temui program-program tersebut mengalami hambatan. Kalau pun menyentuh masyarakat, program-program tersebut banyak yang tidak sesuai lagi dengan konsep. Selain itu, memang banyak program yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat (Junaedi, 2014 : 22).

Sebagai salah satu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada

terciptanya pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah.

Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh efek distribusi pendapatan, konsep distribusi pendapatan secara umum dibedakan tiga aliran ekonomi. Pertama, menurut mazhab Klasik (ortodoks) yang berpegang pada konsep keseimbangan sumberdaya dan konsep pasar bebas. Perbedaan kondisi antar sektor menyebabkan terjadinya pertukaran atau alokasi sumber daya secara efisien tanpa adanya campur tangan pemerintah hingga mencapai kondisi pareto optimal. (Susilowati, *et.al*, 2007 dalam Maipita, 2014 : 156). Aliran ini percaya bahwa pemerataan pendapatan akan terjadi dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui memusatkan pendapatan pada masyarakat kaya. Produksi di atur secara efisien kemudian hasilnya didistribusikan melalui pajak transfer yang diyakini tidak akan mendistorsi perekonomian. Aliran ini disebut juga dengan aliran yang menganut faham kapitalis yang lebih memfokuskan pada pertumbuhan (*grow first, then redistribute*) (Maipita 2014 : 156)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo 2017 sebesar 205,37 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada periode 2016-2017 mengalami kenaikan sebanyak sekitar dua ribu jiwa namun persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 17,72 persen menjadi 17,56 persen. Garis kemiskinan sangat menentukan besar kecilnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2017 garis kemiskinan di Provinsi Gorontalo sebesar Rp 296.730, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 284.232. (Badan Pusat Statistik 2019)

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Tren garis kemiskinan Kabupaten Boalemo sejak tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Namun, persentase penduduk miskin tidak menunjukkan pola yang sama dengan garis kemiskinan. Perubahan nilai persentase penduduk miskin berbeda-beda setiap tahun. Pada tahun 2015 dan

2017 perubahannya bernilai positif sementara di tahun 2014 dan 2016 perubahan persentase penduduk miskin bernilai negatif. (Badan Pusat Statistik 2019).

Kacamatan Mananggu merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Boalemo. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Mananggu berprofesi sebagai petani, salah satunya adalah sebagai petani sawah dengan jumlah 557 petani. Hal ini di dukung dengan luas panen padi sawah sebesar 562 ha². (Badan Pusat Statistik, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Analisis Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pendapatan rumah tangga petani padi sawah terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo?
2. Bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga petani padi sawah terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo?
3. Bagaimana hubungan ketimpangan terhadap kemiskinan petani padi sawah di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi tingkat pendapatan rumah tangga petani padi sawah di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
2. Menghitung tingkat ketimpangan di Kecamatan Mananggu Kabupaten Baolemo
3. Menganalisis hubungan ketimpangan terhadap kemiskinan di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini agar bermanfaat:

1. Bagi akademisi/keilmuan

Dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan yang terkait dengan ketimpangan pendapatan petani rumah tangga petani padi sawah terhadap tingkat kemiskinan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan sub sektor tanaman pangan dan pendapatan petani.

3. Bagi petani

Dapat membantu para petani dalam menganalisis pendapatan hasil panen dan dapat membantu para petani dalam mengambil keputusan penanganan panen.